

CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa setiap kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dan laporan Keuangan dimaksud disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis acrual.

Laporan Keuangan atas pelaksanaan APBD yang disajikan oleh entitas akuntansi SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan tujuan agar laporan keuangan yang telah disajikan oleh entitas akuntansi BKPSDM Kabupaten Temanggung dapat dipahami oleh pihak lain/pembaca, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2019 , secara sistematis terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
- Bab III : Penjelasan Atas Informasi-informasi non Keuangan
- Bab IV : Penutup

BAB II
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET LANCAR

1. Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam Bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. ---

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2019 sebesar Rp. --

2. Piutang

Pada Tahun Anggaran 2019, SKPD masih mempunyai sisa piutang sebesar Rp.10.000.000,-

Piutang sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut merupakan denda pengunduran diri sebagai CPNS, atas nama Linggar Farahesti beralamat di Pawiyatan Luhur, Semarang.

Penagihan telah dilakukan mulai tahun 2011 s/d 2013 (copy surat tagihan terlampir) dan pada bulan Mei 2015 yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup membayar denda dimaksud (surat pernyataan terlampir)

PIUTANG	TAHUN 2019 Rp.	TAHUN 2018 Rp.
Denda pengunduran diri CPNS	10.000.000,-	10.000.000,-

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dengan maksud sebagai pendukung operasional SKPD, dengan rincian saldo per 31 Desember 2018 dan per tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Persediaan	2019 Rp.	2018 Rp.
a. ATK	10.498.350,-	30.536.050,-
b. Alat listrik & elektronik	588.000,-	2.660.000,-
c. Perangko, Materai, benda pos	210.000,-	255.000,-
d. Perlatan kebersihan	745.500,-	499.300,-
e. Bahan Baku bangunan	00,-	00,-
f. Suku Cadang sarana mobilitas	00,-	00,-

g. Belanja Pakaian Kerja Lapangan	00,-	00,-
h. Barang Cetakan	875.000,-	990.000,-
Jumlah	12.916.850,-	34.940.350,-

ASET TETAP

Komposisi dan Nilai Saldo Asset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2018 dengan tidak mencantumkan barang ekstrakontabel tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap		Saldo 2018 Rp.	Saldo 2019 Rp.
1.	Tanah	0	0
2	Alat Angkutan Darat bermotor	670.972.973,-	647.946.973,-
3	Peralatan Pertanian	290.000,-	290.000,-
4	Alat Kantor	377.041.950,-	384.791.950,-
5	Alat Rumah Tangga	258.010.400,-	268.460.400,-
6	Komputer	1.184.965.500,-	1.210.215.500,-
7	Meja & Kursi Kerja/Rapat Pejabat	62.472.300,-	62.472.300,-
8	Alat Studio	38.600.000,-	38.600.000,-
9	Alat Komunikasi	23.832.750,-	23.832.750,-
10	Peralatan Pemancar	1.450.000,-	1.450.000,-
11	Meja Kerja	3.500.000,-	3.500.000,-
12	Layar LCD	8.000.000,-	8.000.000,-
13.	Gedung dan Bangunan	414.975.000,-	414.975.000,-
14.	Instalasi Listrik	13.086.000,-	13.086.000,-
15.	Jaringan Telpon	41.323.000,-	41.323.000,-
16.	Aset Tetap lainnya	66.500,-	66.500,-
	Jumlah Aset Tetap	3.098.586.373,-	3.119.010.373,-

Mutasi aset tetap dalam tahun anggaran 2019 sebesar Rp20.424.000,00 (Rp3.119.010.373,00 – Rp3.098.586.373,00 atau sebesar 0,66 % dibanding saldo per tanggal 31 Desember 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Ikhtisar Mutasi selama tahun 2019

Aset Tetap	Saldo 2018 Rp.	Penambahan	Saldo 2019 Rp.
Tanah	0	0	0
- Alat Angkutan Darat bermotor	670.972.973,-	(-) 23.026.000,-	647.946.973,-
- Peralatan Pertanian	290.000,-	0,-	290.000,-
- Alat Kantor	377.041.950,-	7.750.000,-	384.791.950,-
- Alat Rumah Tangga	258.010.400,-	10.450.000,-	268.460.400,-
- Komputer	1.184.965.500,-	25.250.000,-	1.210.215.500,-
- Meja & Kursi Kerja /Rapat Pejabat	62.472.300,-	0,-	62.472.300,-
- Alat studio	38.600.000,-	0,-	38.600.000,-
- Alat Komunikasi	23.832.750,-	0,-	23.832.750,-
- Peralatan Pemancar	1.450.000,-	0,-	1.450.000,-
- Meja Kerja	3.500.000,-	0,-	3.500.000,-
- Layar (LCD)	8.000.000,-	0,-	8.000.000,-
- Gedung dan Bangunan	414.975.000,-	0,-	414.975.000,-
- Instalasi Listrik	13.086.000,-	0,-	13.086.000,-
- Jaringan Telpon	41.323.000,-	0,-	41.323.000,-
- Aset Tetap lainnya	66.500,-	0,-	66.500,-
Jumlah Aset Tetap	3.034.103.623,-	20.424.000,-	3.119.010.373,-

Saldo akhir aset tetap tahun anggaran 2019 sebesar Rp3.119.010.373,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal tahun 2003 (Neraca Awal) sampai dengan Tahun Anggaran 2019 (tahun berjalan) dan pemindahtanganan aset ke BPPKAD, sehingga atas penyajian saldo aset tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja Modal yang dilaksanakan SKPD. Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

----- Nihil --

b. Alat Angkutan darat bermotor

Meliputi alat-alat angkutan berupa kendaraan angkutan darat, senilai Rp647.946.973,00 yang terdiri/terinci sebagai berikut:

- Nilai aset tetap Tahun 2018 Rp670.972.973,00
- Pemindahtanganan aset ke BPPKAD berupa
3 (tiga) buah Kendaraan dinas roda 2 Rp 23.026.000,00 (-)

Asset tetap alat angkut darat bermotor tersebut terdiri dari:

- Kendaraan Dinas Roda Dua sejumlah 10 unit
- Kendaraan Dinas Roda Empat Sejumlah 4 unit

c. Alat Kantor

Meliputi alat kantor yang berupa Lemari, brangkas, filing cabinet dan lain lain, dengan nilai sejumlah Rp384.791.950,00 terdiri dari:

- Nilai aset Alat Kantor tahun 2018 senilai Rp377.041.950,00
 - Pengadaan Tahun 2019, terdiri dari:
 - Lemari kaca sleeding Rp3.500.000,00
 - Filling cabinet Rp2.000.000,00
 - Podium/Mimbar Rp2.250.000,00
- Rp7.750.000,00

d. Alat Rumah Tangga

Meliputi alat rumah tangga yang berupa Air Conditioner, meja computer, mesin penghisap debu dan lain-lain, sebesar Rp268.460.400,00 terdiri dari:

- Nilai asset Alat rumah tangga tahun 2018 senilai Rp258.010.400,00
 - Pengadaan alat rumah tangga tahun 2019
 - AC Dinding Rp5.500.000,00
 - TV LED Rp3.650.000,00
 - Rak sepatu kayu Rp1.300.000,00
- Rp10.450.000,00

e. Komputer

Meliputi alat kantor berupa computer, laptop, note book, printer, dll senilai Rp1.210.215.500,00 terdiri dari:

- Nilai asset komputer tahun 2018 senilai Rp1.184.985.500,00
 - Pengadaan komputer tahun 2019
 - PC Rp8.500.000,00
 - Laptop acer Rp6.900.000,00
 - Laptop Assus Rp9.850.000,00
- Rp25.250.000,00

f. Meja & Kursi Kerja / Rapat

Meliputi meja dan kursi kerja/ rapat dengan nilai sejumlah Rp62.472.300,00 merupakan nilai asset tetap tahun 2018.

- g. Alat Studio
Meliputi CCTV, Mesin cetak ID Card, AKG wirales mikrofon, dll. Senilai Rp38.600.000,00 merupakan nilai asset tetap tahun 2018
- h. Alat Komunikasi
Meliputi warles amplifier, portabel speaker, senilai Rp23.832.750,00 merupakan nilai asset tetap tahun 2018.
- i. Peralatan Pemancar
Nilai asset Alat Pemancar berupa 1 unit parabola senilai Rp1.450.000,00 merupakan nilai asset tahun 2018
- j. Meja Kerja
Nilai asset meja kerja berupa 1 unit meja kerja senilai Rp. 3.500.000,- merupakan asset tetap tahun 2018
- k. Layar LCD
Nilai asset Layar berupa 1 (satu) unit Layar LCD senilai Rp8.000.000,00 merupakan nilai asset pengadaan tahun 2018
- l. Peralatan Pertanian
Nilai aset sebesar Rp290.000,00 merupakan nilai aset tahun 2018 berupa aset tetap tang pemasang/kar tang.
- m. Bangunan Gedung Tempat Kerja
Gedung kantor BKPSDM terdiri dari 2 (dua) lantai beralamat di jalan Jendral A.Yani No. 32 E senilai Rp414.975.000,00
- n. Instalasi Listrik
Nilai asset sebesar Rp13.086.000,00 merupakan nilai asset tetap instalasi listrik tahun 2018 berupa instalasi listrik di Laboratorium Pengembangan SDM pada BKPSDM.
- o. Jaringan Telpon
Berupa jaringan telpon dan jaringan computer (LAN) senilai Rp41.323.000,00 merupakan nilai asset tetap tahun 2018

p. Buku

Meliputi buku perpustakaan senilai Rp. 66.500,00 merupakan nilai aset tetap tahun 2018

ASSET LAINNYA

Merupakan aset tak berwujud berupa software simpeg Rp.185.350.000

KETERANGAN LAIN:

1. Nilai aset tetap tahun 2019 senilai Rp3.119.010.373,00 merupakan akumulasi nilai aset tetap sampai dengan tahun 2019, yang belum dikurangi dengan penyusutan, sehingga nilai aset tetap Tahun 2019 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.661.873.639,07 menjadi: Rp1.457.136.733,93
2. Nilai aset tetap tahun 2019 sebagaimana angka 1 belum dilakukan rekonsiliasi dengan BPPKAD (Bidang Asset) dan untuk nilai penyusutan masih belum dilakukan penilaian (=Jumlah Penyusutan per tanggal 23 Januari 2019)
3. Sisa UYHD Tahun Anggaran 2019 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp216.538.584,00 yang terinci sebagai berikut:
 - a. Sisa UP/GU sebesar : Rp101.828.423,00 dan
 - b. Sisa TU sebesar : Rp114.710.159,00

B. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pada Tahun 2019 OPD masih mempunyai Kewajiban Jangka Pendek berupa utang belanja sebesar Rp112.135.775,00 terdiri dari:

1. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Bulan Desember 2019 sebesar Rp96.165.040,00

2. Utang Belanja Jasa Kantor sebesar Rp15.870.735,00 terdiri dari:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Rekening Listrik bulan Desember | Rp1.602.404,00 |
| b. Rekening Telepon bulan Desember | Rp 227.811,00 |
| c. Rekening /sewa internet bl.Desember | Rp 924.500,00 |
| d. Rekening Air/PDAM bl. Desember | Rp 375.000,00 |
| e. Upah tenaga SS bulan Desember 2019
(Tenaga kebersihan, Driver, Satpam) | Rp12.336.410,00 |
| f. Premi asuransi | Rp 504.610,00 |
| | -----Rp15.970.735,00 |

C. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas akhir Tahun Anggaran 2019 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal (ekuitas akhir T.A. 2018) dengan hasil penjumlahan surplus/defisit LO dan ekuitas yang dikonsolidasikan. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp	42.300.865,00 (-)
2. Surplus/defisit LO	Rp9.129.083.000,00 (-)
a. Beban Pegawai	Rp4.597.779.877,00
b. Beban Barang dan Jasa	Rp4.531.303.123,00
3. Koreksi atas utang barang jasa, berupa:	Rp 467.100,00 (-)
a. Hasil verifikasi SPJ (kelebihan bayar atas pembelian Barang/jasa)	
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan:	Rp9.131.878.040,00
a. SP2D T.A. 2019	: Rp9.348.416.622,00
b. CP (setor ke Kasda)	: Rp 216.538.582,00
5. Ekuitas akhir	Rp 39.972.925,00 (-)

Catatan :

Nilai Ekuitas Tahun 2019 pada laporan ini belum dicantumkan/dhitungkan dengan nilai ekuitas dari nilai asset tetapnya, karena belum dilakukan rekonsialisasi atas nilai assetnya dengan Bidang Asset BPPKAD.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

Bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan BKPSDM dalam merealisasikan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .. Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019. Adapun pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD (Perubahan) tahun 2019 dengan realisasinya, sebagaimana tabel dibawah ini:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.343.796.330	4.199.500.617	96,68 %
	a. Gaji dan tunjangan	2.842.196.330	2.780.976.417	97,84 %
	a) Tunjangan	1.501.600.000	1.418.524.200	94,47 %
B	BELANJA LANGSUNG	5.952.569.114	4.932.377.423	82,86 %
1.	Program Administrasi kepegawaian	518.963.500	183.392.697	35,33 %
	a. Penerbitan KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun	24.140.000	20.989.500	86,94%
	b. Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	4.500.000	1.430.000	31,78%
	c. Pengelolaan Administrasi kepegawaian	24.479.000	12.658.755	51,71 %
	d. Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP	9.729.000	2.283.500	23,47%
	e. Seleksi penerimaan CPNS	359.445.500	90.945.942	25,30%
	f. Fasilitasi uji kompetensi Jabatan fungsional	32.587.000	11.653.000	35,76%
	g. Pengangkatan PNS	6.967.000	1.421.000	20,39%
	h. Penyusunan Formasi Pegawai	23.371.000	10.782.000	46,13%
	i. Penataan sistem Administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	33.745.000	31.229.000	92,54%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.630.675.300	4.106.602.570	88,68 %
	a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	2.661.888.000	2.413.820.174	90,68 %
	b. Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	384.466.200	280.337.234	72,91 %
	c. Orientasi CPNS	28.974.800	27.514.276	94,95 %

	d. Penyelenggaraan Bimtek	179.207.000	155.675.333	86,86%
	e. Pendidikan penjenjangan struktural	490.492.000	490.089.000	99,92 %
	f. Penyusunan Rencana Pembinaan karir PNS	49.279.000	47.230.972	95,84 %
	j. Penyelenggaraan Assesment	135.617.000	129.599.137	95,56 %
	k. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	9.804.000	8.304.000	84,7 % %
	l. Seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	677.273.800	542.264.944	80,06 %
	m. Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK	13.673.500	11.767.500	86,06 %
3.	Program Pembinaan, Kesejahteraan Aparatur, dan Informasi Kepegawaian	142.995.864	131.328.657	91,84 %
	a. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	5.085.896	4.960.400	97,53 %
	b. Proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	29.279.968	23.599.729	80,60 %
	c. Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS	10.302.984	8.658.700	84,04 %
	g. Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian	9.619.900	8.376.900	87,07 %
	h. Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian Daerah	23.799.416	21.604.000	90,77 %
	i. Operasional pembuatan ID card untuk ASN	43.168.000	43.130.123	99,91 %
	j. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	12.044.000	12.027.105	99,86 %
	d. Monitoring dan evaluasi perundang-undangan bidang kepegawaian	9.695.700	8.971.700	92,53 %
C.	Program Perencanaan, evaluasi dan kelitbangan Perangkat Daerah	4.754.000	4.196.750	88,27 %
	a. Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen Pelaporan	4.754.000	4.196.750	88,27 %
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.351.500	340.756.043	80,11 %
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48.000.000	32.729.836	68,18 %
	b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	67.900.000	51.337.905	75,60 %
	c. Penyediaan Alat tulis Kantor	20.000.000	18.524.000	92,62 %
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.490.000	12.581.000	64,55 %
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	2.348.000	33,54 %
	f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	3.000.000	2.640.000	88 %
	g. Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	20.513.549	68,37 %
	h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000	73.993.000	92,49 %
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	5.425.000	54,25 %
	j. Penyediaan Jasa Pelayanan perkantoran	46.966.000	28.245.710	60,14 %
	k. Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor	92.995.200	92.417.832	99,37 %

3.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	299.818.950	166.100.706	72,27 %
	a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	18.200.000	91 %
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34.220.000	31.046.000	90,72 %
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	49.998.950	33.188.450	66,37 %
	d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	88.100.000	72.135.258	81,87 %
	e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000	2.500.000	100 %
	f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000	9.031.000	25,80%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan dari Belanja Langsung BKPSDM tahun 2019 hanya teralisasi 82,86 % dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp5.952.569.114,00 sehingga terdapat SILPA sebesar Rp1.020.191.691,00 atau sebesar 17,14 % hal ini disebabkan karena :

1. Efisiensi untuk belanja pada program Administrasi pelayanan perkantoran
 Anggaran Belanja pada Program Administrasi pelayanan perkantoran merupakan anggaran yang bersifat penyediaan dana guna tercukupinya kebutuhan rutin pelayanan perkantoran, sehingga penggunaannya juga menurut kebutuhan yang ada yang diperlukan.
2. Efisiensi karena tidak terlaksananya beberapa sub kegiatan, dari kegiatan:
 - a. Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS, khususnya untuk rekening Belanja kepesertaan yaitu untuk biaya Pelaksanaan Seleksi CAT (BKN) yang tidak dilaksanakan ditahun 2019. Pada Tahun 2019 Seleksi Penerimaan CPNS baru terlaksana pada tahap seleksi administrasi dan masa sanggah (sesuai jadwal dari Pusat)
 - b. Kegiatan Seleksi Calon JPT, khususnya untuk belanja honorarium Pansel JPT Eselon IIA dan Biaya Assesment untuk calon peserta JPT Eselon IIA. Tidak terserapnya anggaran ini karena Seleksi Terbuka Calon JPT Eselon IIA (Sekda) tidak dapat diselesaikan di tahun berkenaan karena peserta yang lolos seleksi tidak memenuhi syarat (5 pendaftar, lolos administrasi 2 orang).
 - c. Kegiatan Pengiriman Diklat Teknis dan Fungsional PNS, khususnya untuk belanja biaya diklat bagi PPNS yang direncanakan dan dianggarkan sebanyak 5 orang, yang lolos seleksi hanya 3 orang dan pelaksanaan Diklat di BPSDMD Provinsi Jateng uang saku bagi peserta sudah ditanggung oleh BPSDMD Provinsi Jaeng sehingga dari Kabupaten Temanggung hanya mengeluarkan biaya untuk transportasi peserta.
 - d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah, Diklat Prajabatan bagi CPNS sudah dianggarkan untuk CPNS dari jalur umum dan dari jalur K2 (Bidan) dengan biaya kepesertaan Rp10.000.000,00/orang. Namun demikian ternyata

biaya untuk Diklat Prajabatan bagi CPNS jalur K2 hanya dibutuhkan biaya sebesar Rp250.000,00/orang.

- e. Kegiatan Pengangkatan PNS, anggaran ini direncanakan untuk biaya operasional pengangkatan CPNS menjadi PNS formasi tahun 2018, namun demikian karena pada tahun 2019 belum dilaksanakan pengangkatan CPNS menjadi PNS, oleh karena itu anggaran tidak dimanfaatkan seluruhnya hanya sebagian kecil (25% dari anggaran yang tersedia) untuk pembiayaan konsultasi ke BKN.

Adapun realisasi anggaran berdasarkan rincian belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp4.199.500.617,00 atau 96,67 % dari anggaran sejumlah Rp4.343.796.330,00

Uraian	2019		2018
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai)	2.842.196.330,-	2.780.976.417,-	2.458.157.905,-
(TPP)	1.501.600.000,-	1.418.524.200,-	882.838.200,-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	4.343.796.330,-	4.199.500.617,-	3.340.996.105,-

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Belanja langsung	2019		2018
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)
a. Belanja Barang & Jasa	5.353.712.114,-	4.508.045.013,-	2.568.227.249,-
b. Belanja Pegawai	544.637.000,-	375.086.410,-	426.666.950,-
c. Belanja Modal	54.220.000,-	49.246.000,-	51.457.750,-
Jumlah Belanja Langsung	5.952.569.114,-	4.932.377.423,-	3.046.351.949,-

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.508.045.013,00 atau 84,20% dari anggaran sebesar Rp5.353.712.114,00

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp375.086.410,00 atau 68,86 % dari anggaran sebesar Rp544.637.000

c. Belanja Modal

Belanja Modal terjadi dari Rekening *Belanja Modal aset tetap* dari rekening pengadaan peralatan gedung kantor dan Pengadaan Pelengkapan gedung kantor.

Jumlah anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp49.246.000,00 terinci:

- Belanja Modal Aset tetap Rp43.450.000,00
- Belanja Modal extra kontabel (Pemeliharaan/
Suku cadang) Rp 5.796.000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.246.000,00 atau 90,82 % dari anggaran sebesar Rp54.220.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	% realisasi
Belanja Modal dari Rekening Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	20.000.000,-	18.200.000,-	91 %
Belanja Modal dari Rekening Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	34.220.000,-	31.046.000,-	92,00 %
Jumlah :	54.220.000,-	49.246.000,-	90,82 %

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung yang berdomisili di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 E Temanggung

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 36 Tahun 2017 tentang Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan, fungsi kesekretariatan badan, dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi entitas, pelayanan utama entitas BKPSDM adalah mengelola sumberdaya aparatur sipil negara/PNS. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sampai dengan akhir Tahun 2019 berjumlah 6.670 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---|-------|-------|
| - Pejabat Struktural | : | 633 | orang |
| - Pejabat Fungsional Tertentu (Tenaga Guru, Tenaga kesehatan, Prakom, Penyuluh Pertanian dll.) | : | 4.350 | orang |
| - Fungsional Umum/Staf | : | 1.687 | orang |

Disamping PNS tersebut diatas, terdapat pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 27 orang.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu didukung transparansi, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, efektifitas serta profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, sehingga implementasinya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat

Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh sikap mental, kedisiplinan dan profesionalisme para aparatur Pemerintah. Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan pasti terdapat beberapa kekurangan. Hal ini disebabkan oleh antara lain keterbatasan aparatur dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, 9 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang**



Drs. TEGUH SURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610529 198503 1 005